

## **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Biro Organisasi pada Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang termuat pada rencana strategis Biro Organisasi tahun 2016-2021 dengan 10 (Sepuluh) Program dengan 45 (Empat Puluh Lima) Kegiatan, dan adapun program dan kegiatan tersebut :

#### **1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah

#### **2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

- Pengadaan Meubeleur
- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
- Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset OPD
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor

#### **3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penatausahaan Keuangan SKPD

**5. PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Monev Pencapaian Penetapan Kinerja SKPD Prov.Sumbar
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumbar
- Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Sumbar

**6. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN**

- Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**7. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR**

- Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumbar
- Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda
- Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemprov. Sumbar
- Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumbar
- Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja
- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Dilingkungan Setda Provinsi Sumatera Barat

**8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

- Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan kab/Kota
- Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat
- Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota

## **9. PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH**

- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumbar
- Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se Sumatera Barat
- Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kab/Kota
- Bimbingan Teknis Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
- Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

## **10. PROGRAM PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH**

- Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota
- Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi
- Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
- Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Prov. Sumbar

## **B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

#### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

**Masukan** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 13.420.959,-** dan anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 8.637.201,-** dengan **persentase realisasi keuangan 64,36% namun untuk realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Tersedianya sarana surat menyurat dan honorarium tenaga administrasi dengan target kinerja 12 Bulan

**Hasil** : Tercapainya persentase rata-rata surat terkirim dengan target kinerja 100%.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

**Masukan** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 3.876.000,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 668.939,-** dengan **persentase keuangan 17,26%** namun **untuk realisasi fisik 100%**.

Tidak terpenuhinya target dari pelaksanaan kegiatan ini disebabkan oleh Biro Organisasi hanya melakukan pembayaran terhadap tagihan jasa komunikasi (Telephone), sedangkan untuk tagihan dari pemakaian sumber daya air dan listrik dibebankan kepada anggaran Biro Umum.

**Keluaran** : Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi yang terpenuhi dengan target kinerja 12 Bulan

**Hasil** : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan target kinerja 100%

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

**Masukan** : Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 30.320.520,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 27.931.520,-** dengan **persentase realisasi keuangan 76,90%** sedangkan untuk **realisasi fisik 100%**, hal ini disebabkan adanya efisiensi yang dilakukan dalam penyediaan alat tulis kantor.

**Keluaran**: Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dengan target kinerja 12 Bulan

**Hasil** : Lancarnya administrasi perkantoran dengan target kinerja 100%

4. Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan.

**Masukan**: Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 64.167.750,-** yang realisasi sebesar **Rp.54.414.750,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 84,80%** dan **persentase realisasi fisik 100%**

**Keluaran**: Tersedianya Barang cetak dan penggandaan yang menunjang operasional kantor dengan target kinerja 12 bulan

**Hasil** : Lancarnya administrasi kantor dengan target kinerja 100%

5. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

**Masukan:** Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 12.544.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp.9.100.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 72,54% dan persentase realisasi fisik 100%**

**Keluaran :** Pertemuan/ Rapat yang diselenggarakan dengan target kinerja 12 Bulan

**Hasil :** efektifnya koordinasi kegiatan kedinasan dengan target kinerja 100%

6. Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah

**Masukan:** Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 565.734.680,-** yang terealisasi sebesar **Rp.529.139.227,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 93,53% dan persentase realisasi fisik 100%**

**Keluaran :** Rapat Koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti dengan target kinerja 12 Bulan

**Hasil :** Persentase koordinasi dengan kab/kota dan pusat yang terlaksana dengan target kinerja 100%

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Kegiatan Pengadaan Meubeleurn

**Masukan:** Anggaran tersedia untuk pengadaan meubeleurn kantor sebesar **Rp. 119.780.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.109.560.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 91,47% dengan realisasi fisik sebesar 100%.**

**Keluaran :** Meja Kerja, Kursi Kerja dan Kursi Susun yang diadakan dengan target kinerja 4 unit meja kerja eselon II/III, 4 unit kursi kerja eselon II/III, 30 unit kursi susun dan 1 unit lemari arsip.

**Hasil :** Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 100%.

2. Kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 95.088.337,-** dan terealisasi sebesar **Rp.91.600.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 96,33% dengan persentase realisasi fisik sebesar 100%**

**Keluaran** : Jumlah computer, Printer, Projector dan Scanner yang diadakan dengan target kinerja 4 unit PC, 4 unit printer, 1 unit projector, 1 unit scanner.

**Hasil** : Peningkatan sarana aparatur dengan target kinerja 100%.

3. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**Masukan**: Pada kegiatan ini tersedia anggaran sebesar **Rp. 109.936.412,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 60.986.767,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 55,47% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Kendaraan Operasional/dinas yang dipelihara dengan target kinerja 3 unit roda 4, 1 unit roda 2.

**Hasil** : Jumlah kendaraan yang siap pakai dengan target kinerja 100%.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 2.350.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.2.350.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 100% dan persentase realisasi fisik 100%**

**Keluaran** : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor AC dan mesin tik yang dipelihara dengan target kinerja 5 unit AC, 3 unit mesin ketik.

**Hasil** : Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik dan siap pakai dengan target kinerja 100%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 22.400.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.17.705.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 79,04% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Tersedianya barang inventaris kantor yang dipelihara antara lain 15 unit computer PC, 10 unit notebook dan 10 unit printer dan 1 Camdig, 1 Infocus.

**Hasil** : Jumlah inventaris kantor dalam kondisi siap pakai dengan target kinerja 100%.

6. Kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD

**Masukan :** Anggaran tersedia sebesar Rp. **20.452.500,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 20.079.000,-** dengan **persentase keuangan sebesar 98,17%, dan realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Terlaksananya pembayaran honorarium pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset daerah dengan target kinerja 12 bulan

**Hasil :** persentase asset daerah pada Biro Organisasi yang tercatat dengan target kinerja 100%.

7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 325.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.303.750.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 93,46% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dengan target kinerja 1 unit roda 4.

**Hasil :** Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro Organisasi dengan target kinerja 100%.

8. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 52.386.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.44.100.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 84,18% dan persentase realisasi fisik sebesar 100%.**

**Keluaran :** Terlaksananya penyediaan perlengkapan kantor dengan target kinerja 1 unit penghancur kertas dan 1 unit AC.

**Hasil :** Tersedianya peralatan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dengan target kinerja 100%.

c. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

**Masukan :** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 59.759.699,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 39.790.900,-** yaitu dengan **realisasi keuangan sebesar 66,58% sedangkan untuk realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dengan target kinerja 18 orang

**Hasil** : persentase PNS yang mengikuti Bimtek target kinerja 100%

**d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

**1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD**

**Masukan** : Anggaran tersedia sebesar **Rp. 57.081.750,-** dan yang terealisasi **Rp. 31.740.000,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 55,60%, dan realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan tugas biro yang disusun dengan target kinerja 10 dokumen

**Hasil** : Persentase kewajiban pelaporan biro yang dipenuhi dengan target kinerja 100%

**2. Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah**

**Masukan** : Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar **Rp. 146.951.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 145.989.596,-** atau dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 99,35 % dan persentase realisasi fisik 100%**

**Keluaran** : Terlaksananya pembayaran honorarium pejabat pengelola keuangan selama 1 (satu) tahun/12 kali.

**Hasil** : Meningkatnya persentase realisasi anggaran Biro Organisasi dengan target kinerja 100%.

**e. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Dan OPD Provinsi Sumatera Barat.**

**1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja OPD Provinsi Sumatera Barat**

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 39.802.200,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 36.802.900,-** atau **persentase realisasi keuangan sebesar 92,46% dan persentase realisasi fisik 100%.**



**Keluaran** : Jumlah OPD yang di Monev pencapaian target PK dengan target kinerja 50 OPD

**Hasil** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja BB.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 238.011.095,-** dan terealisasi sebesar **Rp.230.628.700,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 96,90% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah Laporan Kinerja yang disusun dengan target kinerja 31 dokumen (1 dokumen provinsi dan 30 dokumen OPD)

**Hasil** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 100%.

3. Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 81.476.830,-** dan terealisasi sebesar **Rp.72.775.600,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 89,32% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah dokumen perjanjian kinerja yang disusun dengan target kinerja 1 dokumen

**Hasil** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja BB.

4. Kegiatan Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar.

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 161.762.700,-** dan terealisasi sebesar **Rp.150.441.100,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 93% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah peserta bimtek dan anggota tim akuntabilitas yang dilatih dengan target kinerja 157 orang peserta bimtek dan 25 orang tim akuntabilitas.

**Hasil** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 100%

**f. Program Manajemen Perubahan**

1. Kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**Masukan** : Anggaran tersedia sebesar **Rp. 184.500.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 181.574.600,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 98,41% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah peserta sosialisasi dengan target kinerja 94 Orang (Sembilan puluh empat)

**Hasil** : Terlaksananya kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi untuk Provinsi dan Kab/Kota dengan target kinerja 100%.

**g. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**

1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 67.250.188,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 64.898.750,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 96,50% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah PNS Setda yang dilayani sebanyak 550 Orang

**Hasil** : Laporan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan target kinerja 100%

2. Kegiatan Evaluasi Disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat

**Masukan**: Tersedianya anggaran sebesar **Rp. 71.126.270,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 69.189.900,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 97,28% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah Laporan evaluasi disiplin PNS Setda Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 2 dokumen.

**Hasil** : tingkat disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 100%.

3. Kegiatan Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian PNS Setda

**Masukan:** Tersedianya anggaran sebesar **Rp. 45.576.360,-** dan terealisasi sebesar **Rp.42.426.950,-** **persentase realisasi keuangan sebesar 93,09% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah laporan data kepegawaian sebanyak 3 (tiga) dokumen.

**Hasil :** Terlaksananya pelayanan kepegawaian secara tepat waktu dengan target kinerja 100%.

4. Kegiatan Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 24.960.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp.24.900.700,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 99,76% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Laporan pengembangan karier PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja sebanyak 1 (satu) Dokumen

**Hasil :** Tersedianya Bahan Kebijakan Pengembangan Karier PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan target kinerja 100%.

5. Kegiatan Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 92.143.400,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 83.716.243,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 90,85% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah Peserta Rakornis dengan target kinerja 38 Orang

**Hasil :** terlaksananya kegiatan rakornis dengan target kinerja 100%.

6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 35.900.400,-** dan terealisasi sebesar **Rp.35.425.606,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 98,68% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Tersedianya data tentang tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dengan target kinerja 1 dokumen

**Hasil** :Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan target kinerja 100%.

#### **h. Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah**

1. Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 125.000.000,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 120.824.292,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 96,66% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Tersusunnya produk hukum daerah terkait tupoksi perangkat daerah dengan target kinerja 3 pergub

**Hasil** : Terlaksananya penyusunan tupoksi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dengan target kinerja 100%.

2. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kota

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 138.163.600,-** dan yang terealisasi sebesar **Rp. 135.864.450,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 98,34% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Laporan Ranperda/ Ranpergub /Ranperwako kab/kota yang difasilitasi dengan target kinerja 1 Dokumen

**Hasil** : Jumlah rekomendasi Gubernur dengan Target kinerja 100%.

3. Kegiatan Rakornis Kelembagaan Kabupaten Kota se-Sumatera Barat

**Masukan**: Anggaran tersedia sebesar **Rp. 104.348.420,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 94.547.050,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 90,61% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran** : Jumlah peserta rakornis dengan target kinerja sebanyak 38 orang

**Hasil** : meningkatnya wawasan peserta rakornis dengan target kinerja 100%.

4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 108.475.500,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 106.120.850,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 97,83% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** laporan kondisi kelembagaan perangkat daerah kab/kota dengan target kinerja 1 dokumen.

**Hasil :** Jumlah laporan dengan target kinerja 100%.

5. Kegiatan Bimbingan Teknis Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan,

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 116.219.039,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 106.829.500,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 91,92% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah peserta bimbingan teknis analisis beban kerja dalam rangka penetapan kelas jabatan dengan target kinerja 50 orang peserta

**Hasil :** Persentase peningkatan pemahaman peserta Bimtek dengan target kinerja 100%.

6. Kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 343.000.000,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 337.348.258,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 98,35% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Kelembagaan perangkat daerah dengan target kinerja 3 pergub.

**Hasil :** Terlaksananya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 100%.

7. Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 511.133.489** yang terealisasi sebesar **Rp. 489.120.903,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 95,69% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Tersusunnya Dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah dan pembinaan Anjab, evjab dan ABK kab/kota dengan target kinerja 50 dokumen.

**Hasil :** Dokumen evaluasi jabatan perangkat daerah dan terbinanya penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kab/kota dengan target kinerja 100%.

**i. Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**

1. Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/kota

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 112.677.450,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 108.536.450,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 96,32% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** jumlah SOP yang tersusun dengan target kinerja 10 SOP OPD

**Hasil :** Tersedianya SOP OPD dengan target kinerja 100%.

2. Kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi Kabupaten Kota.

**Masukan :** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 42.488.250,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 40.121.338,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 94,43% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah Kabupaten Kota yang di koordinasikan penguatan Ketatalaksanaan dengan target kinerja 4 (empat) Kabupaten Kota

**Hasil :** Persentase Kab/Kota yang menerapkan ketatalaksanaan yang baik dengan target kinerja 100%.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 69.053.335,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 62.068.035,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 89,88% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA dengan target kinerja 50 Orang

**Hasil :** Peningkatan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dengan target kinerja 100%.

4. Kegiatan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 208.198.412,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 202.387.618,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 97,21% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah UKPP yang dinilai dengan target kinerja 10 (Sepuluh) UKPP Provinsi dan 10 (Sepuluh) UKPP Kabupaten /Kota

**Hasil :** UKPP yang menyelenggarakan Pelayanan Publik dengan kategori baik dengan target kinerja 100%.

**j. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten /Kota

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 39.112.335,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 33.066.550,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 84,54% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah UKPP yang dibina dengan target kinerja 6 UKPP

**Hasil :** Percepatan pelayanan pada UKPP yang dibina dengan target kinerja 100%.

2. Kegiatan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 67.437.850,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 66.634.620,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 98,81% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Laporan penyusunan dan penerapan SPM dengan target kinerja 4 laporan

**Hasil :** meningkatnya pemahaman aparatur tentang penerapan SPM dengan target kinerja 100%.

3. Kegiatan Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 80.462.585,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 70.278.243,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 87,34% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Jumlah peserta dengan target kinerja 50 orang

**Hasil :** terukurnya kualitas pelayanan pada unit pelayanan public dengan target kinerja 100%.

4. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 85.298.558,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 76.514.070,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 89,70% dan persentase realisasi fisik 100%.**

**Keluaran :** Tersedianya laporan pengaduan pelayanan publik sebanyak 2 (dua) laporan

**Hasil :** Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pada unit pelayanan dengan target kinerja 100%.

5. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota.

**Masukan:** Anggaran tersedia sebesar **Rp. 112.568.400,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 103.495.900,-** dengan **persentase realisasi keuangan sebesar 91,94% dan persentase realisasi fisik 100%.**



**Keluaran** : Jumlah peserta rakornis pelayanan public dengan target kinerja 100 orang

**Hasil** : Meningkatnya pemahaman tentang pelayanan public dengan target kinerja 100%.

Untuk lebih jelasnya alokasi dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Realisasi Anggaran 2018**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Rp. 696,063,909</b>	<b>Rp. 629,891,637</b>	<b>90.49%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13,420,959	Rp. 8,637,201	64.36%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3,876,000	Rp. 668,939	17.26%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 36,320,520	Rp. 27,931,520	76.90%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 64,167,750	Rp. 54,414,750	84.80%
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rp. 565,734,680	Rp. 529,139,227	93.53%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 12,544,000	Rp. 9,100,000	72.54%
<b>II</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Rp. 747,393,249</b>	<b>Rp. 650,130,767</b>	<b>86.99%</b>
1	Pengadaan Meubeler	Rp. 119,780,000	Rp. 109,560,000	91.47%
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 95,088,337	Rp. 91,600,000	96.33%
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 109,936,412	Rp. 60,986,767	55.47%
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Rp. 2,350,000	Rp. 2,350,000	100.00%
5	Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Rp. 22,400,000	Rp. 17,705,000	79.04%

6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD	Rp. 20,452,500	Rp. 20,079,000	98.17%
7	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Rp. 325,000,000	Rp. 303,750,000	93.46%
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 52,386,000	Rp. 44,100,000	84.18%
<b>III</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Rp. 59,759,699</b>	<b>Rp. 39,790,900</b>	<b>66.58%</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp. 59,759,699	Rp. 39,790,900	66.58%
<b>IV</b>	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Rp. 204,033,050</b>	<b>Rp. 177,729,596</b>	<b>87.11%</b>
1	Penatausahaan Keuangan SKPD	Rp. 146,951,300	Rp. 145,989,596	99.35%
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 57,081,750	Rp. 31,740,000	55.60%
<b>V</b>	<b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>Rp. 521,052,825</b>	<b>Rp. 490,648,300</b>	<b>94.16%</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 238,011,095	Rp. 230,628,700	96.90%
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar	Rp. 39,802,200	Rp. 36,802,900	92.46%
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018	Rp. 81,476,830	Rp. 72,775,600	89.32%
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar	Rp. 161,762,700	Rp. 150,441,100	93.00%

<b>VI</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>Rp. 184,500,800</b>	<b>Rp. 181,574,600</b>	<b>98.41%</b>
1	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 184,500,800	Rp. 181,574,600	98.41%
<b>VII</b>	<b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>	<b>Rp. 336,957,418</b>	<b>Rp. 320,558,149</b>	<b>95.13%</b>
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar	Rp. 71,126,270	Rp. 69,189,900	97.28%
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian	Rp. 45,576,360	Rp. 42,426,950	93.09%
3	Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 24,960,800	Rp. 24,900,700	99.76%
4	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 92,143,400	Rp. 83,716,243	90.85%
5	Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	Rp. 35,900,400	Rp. 35,425,606	98.68%
6	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Prov. Sumbar *****	Rp. 0	Rp. 0	0.00%
7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Rp. 67,250,188	Rp. 64,898,750	96.50%
<b>VIII</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rp. 384,879,728</b>	<b>Rp. 349,989,383</b>	<b>90.93%</b>
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 39,112,335	Rp. 33,066,550	84.54%
2	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Rp. 85,298,558	Rp. 76,514,070	89.70%
3	Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rp. 80,462,585	Rp. 70,278,243	87.34%
4	Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Rp. 67,437,850	Rp. 66,634,620	98.81%

5	Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 112,568,400	Rp. 103,495,900	91.94%
<b>IX</b>	<b>PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Rp. 1,446,340,048</b>	<b>Rp. 1,390,655,303</b>	<b>96.15%</b>
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 343,000,000	Rp. 337,348,258	98.35%
2	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Rp. 125,000,000	Rp. 120,824,292	96.66%
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 138,163,600	Rp. 135,864,450	98.34%
4	Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat	Rp. 104,348,420	Rp. 94,547,050	90.61%
5	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota	Rp. 108,475,500	Rp. 106,120,850	97.83%
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Rp. 116,219,039	Rp. 106,829,500	91.92%
7	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Rp. 511,133,489	Rp. 489,120,903	95.69%
<b>X</b>	<b>PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Rp. 432,417,447</b>	<b>Rp. 413,113,441</b>	<b>95.54%</b>
1	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 42,488,250	Rp. 40,121,338	94.43%
2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Rp. 69,053,335	Rp. 62,068,035	89.88%

3	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	Rp. 112,677,450	Rp. 108,536,450	96.32%
4	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik	Rp. 208,198,412	Rp. 202,387,618	97.21%
<b>Total</b>		<b>Rp. 5,013,398,173</b>	<b>Rp. 4,644,082,076</b>	<b>92.63%</b>

### C. OUTCAME

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
<b>I</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diselesaikan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telephone
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah		Rapat/Koordinasi yang dilakukan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman		Tersedianya makan dan minum untuk rapat
<b>II</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase berfungsinya Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
		<b>Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)</b>	

1	Pengadaan Meubeleur		Perlengkapan Kantor dan mobiler yang diadakan
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Komputer, Printer, penghancur kertas dan projector yang diadakan
3	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya kendaraan dalam kondisi siap pakai
4	Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
5	Pemeliharaan Rutin/ berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi		Barang inventaris kantor yang dipelihara
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD		Terlaksananya pengelolaan dan, pengawasan dan pengendalian aset daerah
7	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional		Tersedianya kendaraan operasional
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan studio yang tersedia
<b>III</b>	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>	
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		PNS yang dapat mengikuti bimtek
<b>IV</b>	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja keuangan</b>	
		<b>Nilai evaluasi SAKIP SKPD</b>	
		<b>Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>	
1	Penatausahaan Keuangan SKPD		Pembayaran honor pejabat pengelola keuangan biro
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan pelaksanaan tugas biro yang disusun

<b>V</b>	<b>PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PROVINSI DAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>Instansi Pemerintah yang akuntabel (skor hasil evaluasi AKIP)</b>	
		<b>Persentase SKPD Yang Telah Mendapatkan Nilai Hasil Evaluasi AKIP <math>\geq 70</math></b>	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		Jumlah laporan kinerja yang disusun
2	Monev Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar		Laporan hasil monev pencapaian perjanjian kinerja jumlah OPD yang di monev
3	Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov Sumatera Barat Tahun 2018		Jumlah dokumen PK yang disusun
4	Bimbingan Teknis Sistem AKIP Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar		Peserta Bimtek AKIP
<b>VI</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	
1	Sosialisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		Peserta sosialisas
<b>VII</b>	<b>PENINGKATAN MANAJEMEN SDM APARATUR</b>	<b>Persentase kesesuaian akurasi data PNS setda dan Pemprov. Sumbar</b>	
		<b>Persentase PNS yang dikembangkan karirnya dilingkungan Pemprov. Sumbar</b>	
1	Evaluasi Disiplin PNS Setda Prov. Sumbar		Peningkatan disiplin pegawai Sekretariat
2	Pengelolaan Personal Record dan Dokumentasi Kepegawaian		Peningkatan Pengelolaan Administrasi dan dokumentasi kepegawaian di lingkungan Setda Prov. Sumbar

3	Monitoring Pengembangan Karier PNS Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat		Terlaksananya pembinaan karier PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat
4	Rakornis Pembinaan Aparatur Daerah Provinsi Sumatera Barat		Terlaksananya rakornis pembinaan aparatur
5	Monitoring dan Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja		Terlaksananya Monev Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai ASN Setda Prov. Sumbar *****		Tercetaknya kartu pengenal ASN
7	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Sumbar
<b>VIII</b>	<b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Rata-rata Indeks Survey Kepuasan Masyarakat</b>	
		<b>Persentase kepatuhan seluruh SKPD Provinsi terhadap pelaksanaan UU Pelayanan Publik</b>	
1	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota		Percepatan Pelayanan pada Unit Pelayanan yang dibina
2	Pengawasan dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		Pengaduan ke unit pelayanan Prov. Sumbar
3	Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Terlaksananya penataan survey kepuasan masyarakat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
4	Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Penyusunan penerapan SPM Provinsi dan Pembinaan SPM Kab/Kota
5	Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan Publik Provinsi dan Kab/Kota		Peserta Rakornis Pelayanan Publik



IX	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH	Persentase pembentukan perangkat daerah sesuai urusan	
		Persentase penurunan rincian tupoksi yang tumpang tindih	
1	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat		Tersusunnya produk hukum daerah terkait kelembagaan OPD/UPT/Cabang Dinas
2	Penyusunan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat		Jumlah Ranperda/Ranpergub SOTK Provinsi
3	Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		Rekomendasi produk hukum kelembagaan kab/kota
4	Rakornis Kelembagaan Kab/Kota se-Sumatera Barat		Peserta rakornis
5	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kab/Kota		Laporan kondisi kelembagaan perangkat daerah kab/kota
6	Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		Jumlah analisis beban kerja
7	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan		Dokumen anjab OPD
X	PENATAAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase SKPD Yang Menerapkan SOP Secara Baik	
1	Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan
2	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Daerah (FORKOMPANDA) Tingkat Provinsi Sumatera Barat		Peserta yang mengikuti FORKOMPANDA

3	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota		Jumlah SOP yang tersusun
4	Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik		Unit Kerja Pelayanan Publik yang dinilai

#### **D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

###### ***Permasalahan :***

Pada tahun 2016 Biro Organisasi melaksanakan penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan permasalahan terjadi adalah kurang optimalnya sosialisasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah terhadap Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Kementerian Dalam Negeri. Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Disamping itu permasalahan lainnya adalah :

- a. Masih adanya OPD yang mengusulkan untuk meningkatkan atau menaikkan type dan juga adanya OPD yang mengusulkan pemindahan urusannya ke OPD lain yang mengakibatkan turunnya type OPD.
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan evaluasi jabatan dan analisa beban kerja
- c. Masih adanya peraturan pedoman nomenklatur yang belum diterbitkan oleh pemerintah pusat, sehingga sebagian perangkat daerah dalam menyusun nomenklatur jabatan dan tugas pokok dan fungsi belum mengacu kepada aturan yang baku.

- d. Masih kurangnya pemahaman aparaturnya dalam penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan.

**Solusi :**

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dan sharing informasi dengan Kementerian dalam negeri serta Kementerian terkait Khususnya yang berhubungan dengan pembahasan penataan kelembagaan provinsi dan kab/kota serta melakukan studi kooperatif dengan Provinsi lain yang dianggap berhasil dalam pemetaan kelembagaan.
- b. Melakukan FGD ( Focus Group Discussion ) dengan instansi terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi, terkait pembahasan indikator urusan kewenangan dan melaksanakan rakornis kelembagaan provinsi dan kabupaten kota untuk peningkatan pemahaman aparaturnya dalam melaksanakan proses penataan kelembagaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Melakukan bimbingan teknis Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan.

## **2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

### **a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik**

**Permasalahan :**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah masih belum optimalnya sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentang penggunaan Aplikasi Lapor SP4N oleh masyarakat guna penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikarenakan keterbatasan anggaran, dan permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin LAPOR-SP4N kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**Solusi :**

1. Melaksanakan bimbingan langsung kepada OPD dalam pengelolaan pengaduan pelayanan public berbasis aplikasi LAPOR-SP4N.
2. Mengadakan Rakornis Pelayanan Publik yang menyangkut kepada pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi LAPOR –SP4N.
3. Melaksanakan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap penerapan pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi LAPOR –SP4N dan melakukan study kooperatif ke provinsi lain yang telah melakukan pengelola pengaduan pelayanan publik berbasis aplikasi LAPOR – SP4N dengan baik.

**b. *Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik***

***Permasalahan :***

Permasalahan dalam melaksanakan pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik di provinsi sumatera barat masih dirasakan adanya kekurangan terutama dalam menciptakan inovasi dalam mengatasi permasalahan dan mengembangkan fungsi pelayanan publik. Permasalahan lainnya adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten / Kota masih belum sempurna dan masih adanya inovasi yang ditampilkan belum menyentuh kepada masyarakat secara utuh terhadap pelayanan yang diterima masyarakat.

***Solusi :***

1. Mengadakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat
2. Menghimbau Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) untuk mengikuti seleksi Sistem Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional.
3. Melakukan pembinaan pelayanan publik terutama yang terkait kepada penerapan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

**c. Pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**

***Permasalahan :***

Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan survey kepuasan masyarakat yang bertujuan agar adanya persamaan persepsi dan pemahaman bagi aparatur pelaksana pelayanan publik pada OPD tentang pentingnya survey kepuasan masyarakat dalam mengetahui kekurangan pelayanan dan mencari masukan dari masyarakat untuk pengembangan pelayanan publik. Permasalahan yang dihadapi adalah :

- Belum seluruhnya OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan biaya untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat
- Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat belum diselenggarakan secara berkala sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

***Solusi :***

1. Menyurati OPD untuk dapat mengalokasikan anggaran pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun oleh setiap OPD
3. Melaksanakan pembinaan Survey Kepuasan Masyarakat kepada seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota.

**d. Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah**

***Permasalahan :***

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya kembali dilakukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro

Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

**Solusi :**

1. Melaksanakan evaluasi dari Standar Operasional Prosedur OPD sesuai dengan penataan kelembagaan OPD.
2. Melaksanakan bimbingan langsung kepada OPD dalam pelaksanaan teknis penyusunan SOP.
3. Melaksanakan pembinaan penyusunan dan penerapan SOP kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.

**e. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

**Permasalahan :**

Penyiapan dokumen dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten, disamping itu masih rendahnya komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

**Solusi :**

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Prov. Sumbar.

**f. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

***Permasalahan :***

Peran birokrasi pemerintah dalam pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sangat strategis, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan atau penataan birokrasi melalui suatu program, yaitu Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan keprofesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum sesuai sebagaimana yang diharapkan, persoalan yang dihadapi dalam penerapan reformasi birokrasi tersebut dikarenakan belum semuanya Organisasi Perangkat Daerah memahami tentang penerapan rencana aksinya. Kendala lainnya yang ditemui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Konsistensi kebijakan yang terkait dengan aspek reformasi birokrasi masih kurang.
- b. Evaluasi reformasi birokrasi dan indikatornya belum dipahami dengan baik sehingga target nilai reformasi birokrasi sulit untuk ditetapkan.
- c. Belum adanya laporan pelaksana reformasi birokrasi dari OPD yang menyangkut kepada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.
- d. Belum semuanya OPD membentuk tim reformasi birokrasi.
- e. Belum adanya evaluasi terhadap program aksi reformasi birokrasi pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

**Solusi :**

Solusi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi adalah melaksanakan sosialisasi reformasi birokrasi kepada seluruh pejabat eselon III dan eselon IV, serta melakukan evaluasi terhadap penerapan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan dalam rangka penyusunan LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI**



**IRWAN, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680415 198902 1 001